

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Partisipasi Politik**

##### **A.1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua tahapan politik, mulai dari pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik adalah partisipasi warga negara biasa dalam membuat semua keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi. Sikap belum tentu partisipasi, tetapi partisipasi adalah sikap politik. Diam dalam arti tidak terlibat dalam kegiatan politik atau tidak terlibat dalam kegiatan politik adalah sikap politik. Sikap politik dan pilihan politik dimulai terbentuknya persepsi. Persepsi dibentuk oleh interaksi stimulus politik dan kesadaran kognitif atau pikiran sendiri. Hal ini kemudian mempengaruhi sikap, aspirasi, perilaku politik dan juga pilihan politik.

Definisi partisipasi politik banyak dikemukakan oleh para tokoh yaitu Huntington dan Nelson (1994:4) di dalam bukunya yang berjudul *No Easy Choice* menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan oleh warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, terus menerus, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Mc Closky mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela rakyat yang terwujud baik secara langsung dalam proses pemilihan penguasa maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang sah dan sedikit banyak ditujukan secara langsung untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau tindakan penyelenggara negara.

Budiardjo (1996:183) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik yaitu memilih kepala negara dan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah (kebijakan publik). Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, berpartisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan, serta berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen.

Setiadi dan Kolip (2013:128-129) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan cara memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik adalah kehendak sukarela dari suatu komunitas baik individu maupun kelompok untuk mencapai kepentingan umum. Oleh karena itu, kegiatan partisipasi politik adalah kegiatan

sukarela masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam membentuk kebijakan publik.

Definisi partisipasi politik begitu luas, maka banyak pendapat yang membatasi partisipasi politik. Gatara (2011:92-93) mengatakan terdapat hal substantif yang menjadi tanda-tanda berkenaan dengan konsep partisipasi politik yaitu berupa kegiatan yang nyata, bersifat sukarela, dilakukan oleh anggota masyarakat biasa baik perorangan maupun kelompok masyarakat, memiliki tujuan berpartisipasi dalam kehidupan politik, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mencari jabatan politik dan memiliki tingkatan partisipasi.

Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak ingin ikut berpartisipasi dalam politik antara lain: (Raden et al., 2019)

1. Status sosial dan ekonomi. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kekayaan. Seseorang dengan posisi sosial yang tinggi membutuhkan minat dan perhatian tentang politik
2. Situasi politik adalah keadaan secara langsung yang mempengaruhi pendapatan, seperti keluarga, kehadiran orang lain, kondisi ruangan, suasana, cuaca dan ancaman.
3. Afiliasi politik orang tua berarti ikut keterlibatan dalam politik dapat dirumuskan sebagai anggota bekerja sama dengan individu atau

kelompok tertentu. Keterlibatan politik mendorong tumbuhnya kesadaran politik masyarakat dan kematangan untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan politik.

4. Pengalaman menjalankan organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan manusia yaitu sebagai tingkah laku yang terpola, memberikan tugas kepada orang-orang tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan bersama.
5. Kesadaran politik, kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik, serta minat dan kepedulian terhadap lingkungan sosial politik di mana ia tinggal.
6. Percayalah pada pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah. Pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak baik dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan pemerintahan yang dipimpin
7. Mendorong partisipasi melalui media sosial dan diskusi informal

## **A.2. Bentuk-bentuk partisipasi politik**

Berbicara tentang partisipasi politik tentu membahas bentuk-bentuk partisipasi politik yang terwujud dalam masyarakat yang dapat menjelaskan dan mengatakan segala bentuk partisipasi politik, sistem politik dan bentuk-bentuk yang mendukung pemerintahan.

Secara umum bentuk partisipasi politik adalah memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu), lebih spesifiknya bentuk partisipasi politik tidak hanya memberikan suara pada saat pemilu, tetapi tentu saja berbeda tergantung dari sudut pandang mana bentuk politik itu sendiri dilaksanakan (Sahid, 2011).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang termasuk dalam sistem politik terbagi menjadi beberapa tingkatan yang menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk dan kedudukan partisipasi politik sebagai berikut (Mahyudin, 2013).

a. Voting (pemberian suara)

Memilih dalam hal ini berarti memilih dalam pemilihan umum (pemilu), pemungutan suara, tugas pemungutan suara (pemilu) adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah. Maka dari itu, masyarakat berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kegiatan pemungutan suara ini. Partisipasi ini termasuk tingkat menengah.

b. Informal group (kelompok informal) dan social Movement (pergerakan sosial).

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mengarahkan aspirasinya dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat organisasi tertentu, di mana berbagai masalah dibahas dan dicari solusinya. Bentuk partisipasi politik ini termasuk dalam kategori partisipasi politik tinggi

karena hanya sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya yang termasuk dalam kategori partisipasi politik tinggi.

c. Direct contact (kontak langsung)

Bentuk partisipasi politik ini bersifat personal yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan termasuk dalam kategori tingkat rendah.

d. Protes activity (aktivitas protes)

Bentuk partisipasi politik ini terjadi disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk partisipasi ini bisa berupa aksi demo atau bahkan kekerasan. Menurut Almond, bentuk partisipasi politik ini termasuk dalam tingkat tinggi karena banyak warga yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ini hanya ada beberapa orang atau kelompok yang berpartisipasi untuk mendapatkan keadilan di negara.

### **A.3. Landasan Partisipasi Politik**

Partisipasi politik didasarkan pada asal individu atau kelompok yang terlibat dalam partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1990:7) mengategorikan 15 landasan partisipasi politik tersebut sebagai berikut :

1. Kelas merupakan orang-orang dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang setara.
2. Kelompok atau komunitas adalah orang-orang dari ras, agama, bahasa, atau suku yang sama.

3. Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan satu sama lain.
4. Partai adalah orang-orang yang mengakui dirinya dalam organisasi formal yang sama dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kendali atas bidang eksekutif dan legislatif.
5. Kelompok adalah individu-individu yang terhubung melalui interaksi terus menerus dan menjalin hubungan patron-klien (pertukaran hubungan antara kedua belah pihak ) termasuk orang-orang yang berbeda status sosial, pendidikan, dan ekonomi.

## **B. Kebijakan Pemerintah**

### **B.1. Pengertian Kebijakan**

Secara umum, kebijakan adalah perumusan keputusan pemerintah yang mengarahkan tindakan untuk mengatasi masalah ketika ada tujuan, rencana, atau program yang perlu dilaksanakan. Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip Jones (1995), pedoman adalah keputusan permanen yang ditandai dengan konsistensi dan pengulangan dalam tindakan mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mengikutinya.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya adalah kebijakan publik dalam arti seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam kedudukan yang berbeda dan sejalan dengan kepentingan umum), baik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sering

disebut kebijakan publik. Dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, politik berarti suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, yang dinyatakan atas dasar kewenangan untuk mengatur dan jika perlu untuk memaksakan. Ungkapan kehendak penguasa tersebut berkaitan dengan konsep pemerintahan yang memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat dikatakan dengan kebijakan negara apabila pemerintah yang melaksanakannya diarahkan kepada pemerintah negara. Jika kebijakan pemerintah berarti usul-usul yang layak (diatur) yang objeknya bersifat publik, tidak hanya dari sudut pandang negara, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat dan kepentingan umum, maka kebijakan pemerintah dapat digolongkan ke dalam kebijakan publik. (Ali dan Syamsu, 2012, hal.1)

## **B.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan**

Adanya hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu (AG Subarsono, 2005: 90 - 92) :

### **a. Komunikasi**

Implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa maksud dan tujuan kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam implementasi. Jika tujuan dan sasaran

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan informasi.

#### 1. Sumber Daya

Isi kebijakan sudah dibicarakan secara jelas dan konsisten, namun apabila pelaksana tidak mempunyai sumber daya maka pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu pengetahuan para pelaksana, dan sumber daya keuangan, termasuk berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memberikan layanan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tetap berada di atas kertas dan hanya menjadi dokumen belaka dan seringkali gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan

#### 2. Disposisi

Temperamen adalah karakter dan kualitas yang dimiliki oleh pelaku, seperti komitmen, kejujuran dan disposisi demokratis. Jika pelaksana memiliki ide yang bagus, mereka dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan menjadi sebuah kebijakan.

### 3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang menegakkan kebijakan memiliki dampak besar pada penegakan kebijakan. Salah satu aspek struktural utama dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (SOP) yang memandu perilaku semua pelaksana. Dan ini muncul sebagai reaksi internal terhadap keterbatasan waktu sumber daya pelaksana dan keinginan untuk bersatu dalam kegiatan organisasi.

## C. Demokrasi

### C.1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan istilah bersifat universal. Konsep “demokrasi” dalam kehidupan masyarakat moder konemporer. Secara etimologis demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat" (Demos berarti rakyat dan Kratos berarti pemerintahan). Namun dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi memiliki arti yang berbeda-beda. Demokrasi digambarkan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dilakukan secara langsung oleh semua warga negara yang dilaksanakan melalui metode pemerintahan mayoritas yang dapat disebut demokrasi langsung. (Rafael Raga Maran, 2007 : 201)

Indonesia adalah negara demokrasi sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama menjabat, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR adalah lembaga yang dipilih oleh rakyat. Dalam pengertian ini, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi

karena pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan. Pemilu pertama diadakan di Indonesia pada tahun 1956. Demokrasi ini adalah demokrasi pancasila. Setelah demokrasi Pancasila ini berakhir, diambil alih oleh pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan demokrasi pertama dan dilanjutkan dengan demokrasi kedua pada tahun 2004.

Indonesia telah melewati empat era demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila dan demokrasi masih transisi. Pertama adalah demokrasi liberal. Kedua demokrasi yang diinduksi. Ketiga, demokrasi pancasila. Keempat masih dalam masa percobaan. Di era demokrasi liberal, Indonesia tidak berubah, justru kabinet mengalami pasang surut. Pada era demokrasi terpimpin, Indonesia berada di bawah kendali penuh Presiden Soekarno yang berdampak positif di forum internasional. Namun pada saat itu, perekonomian Indonesia sedang mengalami penurunan tajam.

## **C.2. Prinsip-prinsip demokrasi**

- a. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan melalui pelaksanaan tanggung jawabnya secara tepat, dan rakyat secara teratur melaksanakan hak-hak publik, biasa dan setara yang rahasia dan independen. Perwakilan harus dipilih melalui pemilihan yang bebas dan adil dengan hak untuk memilih. Pihak berwenang akan memantau pemilu dan bebas dari penipuan dan

intimidasi.

- b. Hak semua orang untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan publik baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- c. Semua orang diperlakukan sama menurut hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya.
- d. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk pertukaran dan penerimaan ide dan informasi di semua media tanpa batas.
- e. Setiap orang berhak atas bebas untuk berpikir, hati nurani, dan agama.
- f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan.
- g. Hak semua orang atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, termasuk membentuk atau bergabung dengan partai politik, masyarakat sipil, serikat pekerja atau organisasi lain milik sendiri, dengan jaminan hukum yang diperlukan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kebebasan mereka atas dasar yang sama di depan hukum

- h. Hak golongan minoritas atau kelompok yang kurang beruntung untuk mendapat perlindungan yang sama di hukum, kebebasan untuk menikmati budayanya sendiri, untuk memeluk dan menjalankan agamanya sendiri, dan untuk menggunakan bahasanya sendiri.

#### **D. Demonstrasi**

Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris *Demonstrate*, yang artinya “memperlihatkan/melakukan/demonstrasi”. Pelaksanaan suatu kegiatan oleh satu orang atau lebih dengan maksud menyatakan pendapatnya di muka umum dengan semangat melalui lisan, tulisan atau pidato umum lainnya di tempat umum disebut unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa istilah, *muzhaharah* dan *masirah*. Istilah *muzhaharah* didefinisikan dalam kamus *al-Munawwir* sebagai "demo", yang tidak menentukan sifatnya anarkis. Jika dalam istilah sosialis *muzhahara* berarti demonstrasi, yaitu demonstrasi yang melibatkan boikot, pemogokan, huru-hara dan perusakan (terorisme) untuk mencapai tujuan revolusi, maka *muzhahara* menganjurkan kejadian tertentu yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum yang jatuh di bawah kewajiban Negara atau pihak penanggungjawabnya. *Muzhaharah* biasanya ditandai dengan kehancuran dan anarki. (Suprima, 2022 : 134 -143)

*Masirah* secara harfiah berarti 'perjalanan' dan tercantum dalam kamus *Al-Mawrid* berarti *march*, atau *long march*. . *Masirah* dengan

demikian merupakan istilah yang menggambarkan demonstrasi yang tidak merusak, long march yang menekankan pada pola pergerakan daripada diam di satu tempat (pawai) disebut pola dinamis, berbeda dengan pola statis hanya diam saat melakukan aksi di satu tempat. Tindakan anggota DPR yang korupsi, bhpolitisi yang hanya mewakili kursi, bahan bakar minyak naik dan partai yang terlalu egois untuk mengejar kepentingannya sendiri telah memupuskan harapan akan demokrasi.

Demonstrasi bukanlah ajang demo untuk crazy. Kemungkar tentu harus dilawan. Semua kejahatan tidak bisa dibungkam. Untuk itu, warga negara, mahasiswa, persidem, dan seluruh elemen negara harus mengontrol pemerintah setiap saat. Jika sebuah kebijakan salah karena tidak berpihak pada rakyat, maka kejahatan harus dilawan. Demonstrasi hanyalah salah satu dari banyak cara untuk mengomunikasikan keinginan dan penolakan. Masih segar dalam ingatan kita bahwa runtuhnya sistem Orde Baru akibat demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran. Demonstrasi mahasiswa terbukti mampu meruntuhkan pemerintahan Presiden Soeharto. Sejak itu, demonstrasi mahasiswa menjadi sekuat ketakutan pihak berwenang. (Ragil Ira Mayasari, 2019 : 1-8)

Demonstrasi sering dipilih oleh sekelompok orang sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tertentu dan sebagai sarana untuk menyampaikan keinginan mereka. Namun dalam beberapa kasus, demonstrasi disertai dengan kerusuhan dan anarki. Demonstrasi di depan gedung DPRD di Palembang dan di beberapa lokasi lainnya antara lain

dirusaknya pagar bangunan, pelemparan batu ke aparat keamanan, pembakaran ban, penutupan jalan, dan berbagai tindakan “gila” lainnya. Tentu saja, ketika demo berubah menjadi ajang "gila", makna demo yang baik menjadi buruk.

Demonstrasi seringkali tidak terkendali dan emosional, sehingga sering terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran. Demonstrasi yang dijadikan sebagai wahana untuk mengekspresikan cita-cita telah mencoreng nama mereka. Demonstrasi anarkis bukanlah bagian dari demokrasi. Demonstrasi sering kali dihadiri oleh oknum-oknum yang sengaja mencoba mengacaukan situasi. Ketika demonstrasi menjadi anarki, mereka telah menyimpang dari tujuan sebenarnya. Dalam demokrasi, suara rakyat harus didengar. Jalan keinginan orang tidak boleh dihalangi. Segala bentuk aspirasi masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan.

Demonstrasi adalah cerminan dari proses demokrasi. Demonstran juga harus bertindak secara bertanggung jawab. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat telah melakukan berdemonstrasi untuk menyampaikan pendapat atas kebijakan pemerintah yang diterapkan seperti naiknya harga BBM baru-baru ini. Sebagai cendekiawan, mahasiswa harus selalu menampilkan sikap kritis dengan cara yang cerdas, elegan dan masuk akal ketika mengkomunikasikan tujuan mereka. Pengunjuk rasa harus beretika, analitis (memahami masalah) dan menghadirkan solusi sebagai pendapat dan saran terhadap masalah yang ada.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik kegiatan protes yang dilakukan oleh beberapa para warga yang termasuk bentuk partisipasi tingkat tinggi. demonstrasi adalah partisipasi secara nonkonvensional seperti perusakan, pembakaran, kekerasan politik terhadap manusia.